

**PELAKSANAAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM
MENINGKATKAN PEREKOMIAN MASYARAKAT DI DESA TANJUNG
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR**

Siti Ulva

Pembimbing Zulkarnaini, S.Sos, M,Si

sitiulva51@gmail.com

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

ABSTRACT

Implementation of Establishment of Village Owned Enterprises in improving community economy in sub-district of Kampar Kara Kampar upstream Kampar district is an effort to see whether the development of bumdesa implemented in accordance with the purpose of the establishment of the bumdesa. Establishment of a Village Owned Enterprise Tanjung is intended to establish business entities engaged in areas compatible with village authorities, able to provide services to the community, mobilize the village economy and contribute to village income. Until now, BUMDesa shoot hope is difficult to develop because the existing funds are not well managed due to lack of human resources management, members of BUMDesa do not know how to manage funds properly and lack of computer control due to lack of coaching to members.

The theory used based on Village Regulation number 02 of 2016 on the Implementation of Establishment of BUMDesa. The research method used is descriptive qualitative. Informants in this study are village officials and administrators BUMDesa Tunas Harapan and community totaling as many as 6 people. Sampling technique using purposive sampling with certain consideration. The result of research that the implementation of the establishment of the Village Owned Enterprises in improving the economy of the people in the village of Tanjung Kampar Kampar hill sub-district is not fully implemented because in the implementation there are still shortcomings This is caused by several factors such as the management of unfavorable business units, village and the lack of cooperation with other institutions. Factors that influence the community participation is still lacking, because the community has not felt the benefits of BUMDesa, human resources (HR) that still lack the ability and expertise in managing BUMDesa in accordance with its function and lack of coordination between the Village side with the management of BUMDesa. In addition, it is necessary to procure training and development of human resources (HR) BUMDesa management to increase the ability, skill and adequate insight in running the planned business.

Keywords : Implementation, BUMDesa, Community Economy.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kesenjangan perkembangan antar wilayah di suatu Negara, meliputi wilayah – wilayah yang sudah maju dan wilayah – wilayah yang sedang berkembang memicu kesenjangan sosial antar wilayah. Salah satu faktor terjadinya kesenjangan antara desa dan kota karena pembangunan ekonomi sebelumnya cenderung bias kota. Sebagai dampak pemberlakuan model pembangunan bias perkotaan, sektor pertanian yang identik dengan ekonomi pedesaan mengalami pemerosotan. Dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri dan jasa, yang identik dengan ekonomi perkotaan, sektor pertanian menjadi semakin tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap Negara mencoba melakukan tindakan intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah dengan melakukan pembangunan pedesaan.

Pembangunan berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian Negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber – sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana – sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang. Jika diperkaya dengan penguatan ekonomi yang bernilai tambah, pasar kontrol secara efektif, penguasaan sumber daya, dan organisasi/lembaga ekonomi yang mapan, maka lumbung ekonomi desa akan terbangun dan kesejahteraan warga akan terwujud.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu akar permasalahan kemiskinan dikawasan pedesaan adalah terdapatnya ketidak seimbangan hubungan dengan perkotaan yang cenderung merugikan pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pedesaan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat guna memandirikan masyarakat desa dalam pengelolaan proses pembaharuan yang profesional dengan menitik beratkan pada pembangunan yang berlandaskan swadaya dan gotong royong masyarakat desa dengan mempertimbangkan potensi desa dan aspirasi kebutuhan masyarakat.

Undang – undang nomor 06 tahun 2014 tentang pemerintah desa disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa dalam hal ini dipimpin oleh kelapa desa bertanggung jawab memberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini di Desa dapat didirikan badan usaha milik Desa (BUMDesa) untuk meningkatkan perekonomian Desa. Kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal dananya berasal dari anggaran dana desa. Dalam anggaran dana desa 30 % dari total anggaran diperuntukkan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dijelaskan dalam undang - undang no 06 tahun 2014 tentang desa Pasal 87 yaitu :

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa.
2. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
3. BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan

umum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan negara yang mempunyai kekuasaan umum berada ditingkat yang bawah, dan merupakan miniatur pemerintahan negara, dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa berkewajiban melakukan upaya pemberdayaan (ekonomi) desa yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan strategi.

Pasal 3 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 menegaskan bahwa BUMDesa didirikan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan manfaat aset, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa, yang kesemuanya diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Sedangkan sesuai Pasal 89 Undang - Undang tentang Desa hasil usaha BUMDesa selain akan digunakan bagi pengembangan usaha BUMDesa itu sendiri, dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin.

BUMDesa digagas untuk mengelola sumber daya ekonomi, sekaligus memperkuat watak kolektivitas yang berakar kuat di desa. Sungguh pun begitu, operasi BUMDesa tak boleh bertabrakan dengan aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan rakyat selama puluhan tahun. Keberadaannya justru harus berpadu dan memperkuat ekonomi rakyat.

BUMDesa sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Pembangunan BUMDesa merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga – lembaga ekonomi desa serta

merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Badan Usaha Milik Desa menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Sementara itu, untuk jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa diantaranya: usaha bisnis sosial melalui usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan usaha bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko dan tanah milik Badan Usaha Milik Desa dan usaha bersama sebagai induk dari unit – unit usaha yang dikembangkan melalui pengembangan kapal desa dan desa wisata.

Badan Usaha Milik Desa itu sendiri pada dasarnya adalah pengembangan kreatif yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kampar atas program UED-SP yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Program ini, diharapkan perekonomian masyarakat sektor kecil dan menengah dapat terus tumbuh. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu realisasi program pemberdayaan desa (PPD). Berdasarkan hasil musyawarah badan permusyawaratan desa (BPD) tentang pembentukan badan usaha milik desa maka disetujui pemindahan aset yang dimiliki UED-SP mekar sejahtera ke BUMDesa tunas harapan pada tanggal 17 juni tahun 2016.

Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan menggunakan prinsip usaha bersama dan kekeluargaan sebagai cerminan dari budaya masyarakat desa. Budaya ini kemudian diperkuat dengan serangkaian pelatihan keterampilan usaha sehingga kekuatan budaya tersebut dapat melahirkan produktivitas yang lebih tinggi. Semakin produktif sebuah masyarakat, maka taraf ekonomi pun akan meningkat dengan sendirinya. Bantuan dana dari pemerintah tentu bukan satu – satunya faktor yang dapat menunjang tumbuhnya kesejahteraan masyarakat desa. Tak kalah pentingnya adalah bagaimana dengan dana

yang diberikan itu, warga desa dapat mengembangkan secara kreatif dalam berbagai bentuk usaha produktif, maka dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa berperan sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut.

Badan Usaha Milik Desa Tanjung bernama “Tunas Harapan” didirikan pada tanggal 18 bulan juni tahun 2016, Badan Usaha Milik Desa Tanjung berkedudukan dan berkantor di Desa Tanjung. Badan Usaha Milik Desa di bentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tanjung dengan menggali potensi yang ada, perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat BUMDesa adalah usaha yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dan di setujui badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Tanjung dimaksudkan untuk mendirikan badan usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Tujuan pembentukan badan usaha milik desa tanjung adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

Tabel I.1 Potensi Ekonomi Desa Tanjung Tahun 2017

N O	JENIS POTENSI	LUAS LAHAN (Ha.)	YANG DIPRODUKSI	KETERANGAN
1.	Perkebunan Karet	4.500	225 KSI	5. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
2.	Perkebunan Gambir	1500	1000	a. Melaksanakan dan mengembangkan bumdesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa.
3.	Perkebunan Jeruk	150	-	b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
4.	Persawahan	250	50	
5.	Palawija	200	54	Cabe, Sayur

6.	Kolam dan Keramba	12	6
7.	Hutan Produksi	2500	-
8.	Lahan Tidur	800	250
9.	Industri Rumah Tangga	7 unit	5
10.	Sawit	250	125

Sumber: Dok Monografi Desa Tanjung Tahun 2017

Dari data diatas dapat dijelaskan terdapat banyak sekali potensi ekonomi yang ada didesa tanjung yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian desa. Potensi yang paling tinggi adalah perkebunan gambir, perkebunan karet dan sawit. Namun masih banyak terdapat lahan tidur yang belum diolah. Hal ini disebabkan tidak adanya dana untuk menolah lahan tidur tersebut. Oleh karena itu pemerintah desa telah mengusulkan 250 Ha dari total 800 Ha lahan.

Peraturan Desa Tanjung Nomor 02 tahun 2016 dijelaskan tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dijelaskan dalam peraturan pasal 19 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan badan usaha milik desa (bumdesa), yaitu:

1. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Direktur
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Kepala unit usaha
2. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola bumdesa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

3. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan bumdesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa.
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan

- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
4. Pelaksana operasional sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha bumdesa setiap bulan
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha bumdesa setiap bulan
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha bumdesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 tahun.

Dalam peraturan Desa Tanjung NO. 02 Pasal 6 disebutkan pendirian Badan Usaha Milik Desa bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Tabel. I.2 Modal Awal Bumdesa Tunas Harapan Desa Tanjung tahun 2016 - 2017

No	Sumber Dana	Jumlah Dana
1	Pemerintah Provinsi Riau	Rp.500.000.000
2	Pemerintah Kabupaten Kampar	Rp.290.000.000

3	Anggaran Dana Desa (ADD)	Rp.65.000.000
Total		Rp.855.000.000

Sumber Data: Direktur BUMDesa Tunas Harapan 2017

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga sumber dana untuk pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), bisa kita lihat jumlah dana dari pemerintah Provinsi Riau sebanyak Rp.500.000.000, kemudian besaran dana dari pemerintah daerah sebanyak Rp.290.000.000, terakhir dana masuk dari anggaran dana desa yaitu berjumlah Rp.65.000.000, jadi total dana yang terkumpul untuk modal awal BUMDesa Tunas Harapan adalah Rp.855.000.000. Dana yang terkumpul digunakan untuk pembangunan BUMDesa, yaitu pembelian lahan untuk perkebunan sawit dan lokasi perternakan, pembelian hewan ternak (sapi) dan kebutuhan usaha lainnya. Untuk selanjutnya pengelolaan BUMDesa akan didanai dari Anggaran Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Tanjung didirikan pada bulan juni tahun 2016. Saat ini telah didirikan tiga unit usaha yaitu, usaha perternakan sapi, perkebunan sawit, perdagangan pupuk. Unit usaha perternakan dikelola oleh kepala unit usaha, kepala unit usaha berhak mendapat hak atas gaji yaitu Rp. 200.000 perbulannya. Pada saat ini usaha yang telah terbentuk adalah perternakan sapi, jumlah sapi saat ini yaitu 9 ekor sapi. sampai saat ini pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) masih dianggap belum efektif dalam membangun perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dari tidak adanya perkembangan dari unit usaha yang telah berjalan selama 1 tahun, tidak adanya produk yang dihasilkan dari unit usaha yang telah dibentuk yaitu peternakan sapi. Unit usaha perkebunan sawit sudah masuk dalam tahap pengarapan lahan, sedang unit

usaha perdagangan pupuk telah dibuka kios penjualan pupuk bersubsidi.

Tabel I.3 Penggunaan Dana BUMDesa Tahun 2016/2017

No	Penggunaan Dana	Jumlah Dana
1.	Pembelian Sapi (9 Ekor)	Rp. 90.000.000
2.	Biaya Pembuatan Kandang Sapi	Rp.20.000.000
3	Pembelian Lahan Sawit	Rp.65.000.000
4	Pembelian Bibit Sawit	Rp.4.500.000
5	Modal Awal Penjualan Pupuk	Rp.200.000.000
6	Sewa Ruko Penjualan Pupuk	Rp.20.000.000
7	Upah kepala unit usaha 1 Tahun	Rp.19.200.000
Jumlah		Rp. 418.700.000

Data olahan kepala unit usah BUMDesa: 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan dana badan usaha milik tanjung sebesar Rp. 418.700.000. yang digunakan untuk keperluan unit usaha.

Bidang usaha Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan meliputi:

a. Perternakan

Unit usaha perternakan merupakan unit usaha yang pertama kali didirikan, usaha perternakan yang dipilih adalah perternakan sapi, hal ini karena perternakan sapi mudah cara pengelolaannya, pembelian sapi yaitu Sembilan ekor sapi yang diperoleh dari modal awal. Penggunaan dana untuk perternakan sapi untuk pembelian Sembilan ekor sapi Rp. 90.000.000, dan untuk biaya pembuatan kandang sapi sebesar Rp. 20.000.000. Sampai saat ini jumlah sapi diperternakan masih Sembilan ekor sapi, belum ada tambahan sapi.

b. Perkebunan

Unit usaha Perkebunan yang akan didirikan adalah perkebunan kelapa sawit yaitu dengan luas satu hektar. Penggunaan dana untuk unit usaha perkebunan yaitu sebesar 69.500.0000, untuk pembelian lahan satu hektar sebesar Rp. 65.000.000 dan untuk pembelian bibit sawit sebanyak Rp.4.500.000. Saat ini telah sampai pada tahap penggarapan lahan, dan pembelian bibit sawit, namun masih belum ada satu pun bibit sawit yang ditanami.

c. Perdagangan

Perdagangan merupakan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang ketiga, unit usaha ini menjual pupuk subsidi. Penggunaan dana untuk unit usaha perdagangan pupuk sebanyak Rp. 220.000.000, untuk modal awal penjualan pupuk sebanyak Rp.200.000.000 dan untuk sewa ruko sebanyak Rp.20.000.000. saat ini sudah berjalan satu tahun.

Direktur Badan Usaha Milik Desa Tunas Harapan mengatakan faktor yang menghambat usaha untuk berkembang adalah kurangnya manajemen sumber daya manusia yang ada di desa. Direktur bekerja sendiri dalam membuat segala sesuatu yang diperlukan dalam usaha untuk perkembangan usaha, kepala unit usaha sendiri hanya mengawasi perternakan saja, tidak membantu dalam manajemen BUMDesa tersebut. Sedangkan anggota sendiri mengaku tidak paham cara kerja dari Badan Usaha Milik Desa tersebut.

Sampai saat ini BUMDesa tunas harapan sulit untuk berkembang karena dana yang ada tidak terkelola dengan baik hal ini disebabkan kurangnya manajemen sumber daya manusia, anggota BUMDesa tidak tahu cara mengelola dana dengan baik dan kurang menguasai komputer dikarenakan tidak adanya pembinaan kepada anggota. Sehingga diperlukan pembinaan dari pemerintah desa dan direktur BUMDesa agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tunas Harapan ini dapat membantu meningkatkan perekonomian desa tanjung sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDesa Tunas Harapan. Disamping itu Usaha yang ada

masih sedikit dan belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu Perlu di buat unit usaha – usaha tambahan yang akan meningkatkan perekonomian desa dan menjadikan BUMDesa efektif didirikan dan tercapai tujuannya meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dengan judul penelitian “**Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**”.

B. Rumusan Masalah

Desa merupakan organisasi Negara yang memiliki otonomi tersendiri yang disebut otonomi desa. Yakni kekuasaan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuan dari otonomi desa itu sendiri untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan tersebut memerlukan kejelian kepekaan seorang pemimpin terhadap apa dibutuhkan dalam masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas – tugas yang emban oleh kepala desa tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan tujuan agar pelaksanaan tugas dan kepala desa agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, walaupun dalam kebijakan yang diterapkan masih perlu untuk dikoreksi dan dibenahi pada pedoman peraturannya. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah kepala desa harus dapat meningkatkan pelaksanaan tugas sebagai pemimpin, pemberi semangat dan dorongan kepada bawahan serta sebagai pengayom masyarakat, agar keberhasilan tugas sesuai dengan yang diharapkan dan dapat bekerja secara efektif.

Berdasarkan gejala – gejala diatas penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ?
2. Apa saja faktor -faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
 - b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian desa masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah Sebagai bahan informasi bagi instansi terkait yaitu kepala desa tanjung kecamatan koto Kampar hulu kabupaten Kampar.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai referensi untuk peneliti masalah yang sama atau kelanjutan dari penelitian ini.
2. Sebagai sarana untuk mencapai ilmu yang telah dipelajari penulis selama proses perkuliahan.

D. Konsep Teori

a. Pelaksanaan

Secara umum fungsi manajemen adalah kegiatan yang dijalankan berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti suatu tahapan tertentu

dalam pelaksanaannya. Fungsi manajemen terdiri dari atas *planning*, *organizing*, *ectuating*, dan *controlling*. Dari seluruh rangkaian proses manajemen tersebut, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama, dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan orang-orang dalam organisasi.

Menurut **Siswanto (2005:7)** mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi.

Badrudin (2014:21) membagi sumber-sumber manajemen (*tools of manajemen*) kedalam 6 m, yaitu:

- a. *Man* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional atau pelaksana
- b. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan
- c. *Methods* yaitu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan
- d. *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan
- e. *Machines* yaitu mesin atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan
- f. *Market* yaitu pasar penjualan barang dan jasa

Terry (2006:4) dalam teorinya menyatakan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang dilakukan untuk menentukan saran-saran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Yahya (2006:2) sebagai seni, manajemen adalah sebagai bidang ilmu pengetahuan, yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama untuk mencapai tujuan dan lebih bermanfaat. Praktek manajemen seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip teori. Manajemen bukan hanya sebagai ilmu dan seni, tetapi merupakan kombinasi keduanya.

Menurut **handoko (2003:8)** mendefinisikan manajemen adalah proses:

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pengarahan
- d. Pengawasan

Menurut **Terry**, dalam **Manullang (2012:3)** fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*planning*)

Fungsi manajemen merupakan suatu kegiatan dimana didalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikehendaki.

- b. Pengorganisasian (*organizing*)

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Didalam suatu organisasi terdapat beberapa unsur yaitu: adanya perincian kerja, penempatan, dan pembagian tugas.

- c. Pelaksanaan (*actuating*)

Setelah perencanaan dan pengorganisasian selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh dalam manajemen adalah mewujudkan rencana tersebut dengan menggunakan organisasi yang terbentuk. Menurut **badrudin (2015:152)** dalam **Lily sarvini** pelaksanaan pelaksanaan

adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Pelaksanaan atau penggerak merupakan fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Sehingga diperlukan adanya kepemimpinan, motivasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya.

d. Pengawasan (*controlling*)

Menurut **Terry** dalam **Manullang (2012:8)**, pengawasan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian.

Teori yang dikemukakan oleh **Geogr C. Edwards III** yang dikutip oleh **Syukur (1987:40)** mengenai Faktor-faktor dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu program adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi yang disampaikan.
2. Rosouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksana terhadap

program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.

4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian tanpa pola yang baku.

b. Pemberdayaan masyarakat

Menurut **Prijono** dan **Pranarka** dalam **Sulistiyani (2004:78)**, pemberdayaan mengandung 2 arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or aurtority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi, memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau yang belum berdaya. Disisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Pemberdayaan itu sendiri oleh **Suharto (2005:155-156)** adalah sebuah proses, yang dengan itu individu maupun komunitas memperoleh penguasaan dan kontrol atas hidup mereka sendiri dan partisipasi demokratis dalam kehidupan masyarakat mereka. Berdasarkan skema itu pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik, kompetensi partisipatif.

Sujianto (2009:147) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan dan sasaran pembangunan, karena pemberdayaan masyarakat adalah sebagian dari masalah-masalah yang lebih besar yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh yaitu masalah sektor, antar wilayah dan antar golongan penduduk.

Istilah pemberdayaan pertama kali digunakan oleh aktivis *gerakan black panther* dalam mobilisasi politik di USA pada 1960-an. Menurut **Sumodinigrat**

(2007:66) konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

- a. Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang
- b. Pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat
- c. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara menciptakan kebersamaan dan kemitraan sebagai tolak ukur normatif, struktural, dan substansial.

Mardikanto dan Soebianto (2015:113), mengungkapkan bahwa lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat, hanya akan terwujud seperti yang diharapkan apabila didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan yaitu:

- a. Bina manusia, merupakan upaya yang pertama dan utama yang diperhatikan disetiap pemberdayaan masyarakat. Dilandasi oleh tujuan pembangunan untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia
- b. Bina usaha, menjadi sangat penting dalam setiap pemberdayaan. Sebab, apabila tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan, tidak akan laku dan bahkan menambahkan kekecewaan. Sebaliknya hanya bina manusia yang mampu memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan laku memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- c. Bina lingkungan, isu lingkungan sangat penting terlihat dengan adanya kewajiban melakukannya AMDAL (analisis manfaat dan dampak lingkungan). Hal ini dinilai penting, karena peletarian lingkungan (fisik) akan menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi.

Menurut **Sumaryadi** dalam **Mardikanto dan Soebianto (2015:122-123)** tahapan kegiatan pemberdayaan adalah:

- a. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan

memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat

- b. Menumbuhkan kemauan atau keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan atau kenikmatan dan hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.
- c. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- d. Meningkatkan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.
- e. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan
- f. Peningkatan efektifitas dan efisien kegiatan pemberdayaan
- g. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru

Proses pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh **Mardikanto dan Soebianto (2015:126)**, yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian
- c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok
- d. Memantau proses hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif.

Pemberdayaan harus dilakukan terus-menerus, komperenshif, dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperoleh. Menurut **Ndraha (2003:132)** diperlukan berbagai program pemberdayaan diantaranya:

- a. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) yang diperintah terhadap pemerintah. *Bargaining* ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.
- b. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negative pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
- c. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan sumberdaya manusia melalui human investment guna meningkatkan nilai manusia human dignity, penggunaan, dan perlakuan yang adil terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah dan pihak lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang memungkinkan suatu kelompok atau masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan.

Oleh karena itu usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan perdesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan perdesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang

dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spectrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak tergantung dan dapat lepas dari terbelenggu structural yang membuat hidup sengsara. Karena itu, ruang lingkup pembangunan perdesaan sebenarnya sangat luas, implikasi sosial dan politiknya juga tidak sederhana. Banyak Negara berkembang termasuk Negara Indonesia, telah membangun dan mengembangkan bermacam-macam strategi pembangunan perdesaan. Sebagian dari strategi itu telah mendatangkan keberhasilan, tetapi sebagian yang lain gagal, malah ada pula yang menciptakan apa yang lazim disebut dengan istilah kolonialisme internal atau mempelebar jurang kemiskinan dan kesenjangan. Banyak Negara berkembang kini mendefinisikan kembali strategi pembangunan perdesaannya atau melakukan proses *reassessment*. Menurut **Usman (2010:31-32)**.

Suharto dalam **Mardikanto (2015:171-172)** penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktur yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak terlindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbangan (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpicirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan berusaha.

c. Pembangunan Ekonomi

Almahdi syahza (2009: 5, 115)

Pembangunan ekonomi adalah usaha – usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan terjadi pertumbuhan ekonomi yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan menyangkut perkembangan berdimensi tunggal diukur dengan meningkatnya produksi dan pendapatan. Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita masyarakat.

Perkembangan sektor ekonomi pertanian di daerah Riau sampai saat ini cukup menggembirakan. Namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Karena itu pemerintah daerah

riau mencanangkan sasaran pembangunan daerah riou harus memacu kepada lima pilar utama, yaitu:

1. Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
3. Pembangunan kesehatan/ olahraga
4. Pembangunan/kegiatan seni budaya
5. Pembangunan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa

Pelayanan pemerintah yang paling penting dalam mendukung pembangunan ekonomi adalah:

1. pendidikan melalui pendidikan akan tercipta manusia yang berkualitas sebagai motor dalam pembangunan.
2. Kesehatan masyarakat
3. Keluarga berencana yang tujuannya adalah pengurangan angka kelahiran dan menekan angka kematian.

M. Suparmoko (2002: 99) Yang dimaksud dengan potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendiri dan berkesinambungan.

Tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil per kapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah, maka strategi tersebut akan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan usaha di daerah yang bersangkutan

Strategi pembangunan yang efisien, kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang efisien harus dapat diusahakan agar pembangunan ekonomi daerah benar – benar membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Berbagai

cara dapat ditempuh untuk mencapai efisiensi di segala bidang kehidupan di antaranya adalah dengan cara:

- a. tingkatkan produktivitas, meningkatkan produktivitas bagi kegiatan apa saja dengan cara menggunakan input tertentu untuk menghasilkan lebih banyak output.
- b. Hapuskan sebab – sebab ekonomi biaya tinggi
- c. Tentukan batas konsumsi maksimal yang layak.
- d. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
- e. Perbaiki kualitas SDM (produktif, efisien, dan bermoral).
- f. Pertahankan fungsi lingkungan
- g. Kerjasama antar daerah.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan suatu keadaan objek dan subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana tampaknya.

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih oleh penulis yang sesuai dengan topik atau permasalahan yang menjadi penelitian. Dengan pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDesa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

c. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberi keterangan. Informan adalah suatu istilah yang memberikan pengertian kepada seseorang atau subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi yang diketahui. Dalam teknik penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive

yaitu, teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu misalnya orang yang dianggap yang paling tahu terhadap permasalahan yang diteliti, atau mungkin orang yang dianggap paling menguasai sehingga memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris, desa, direktur bumdesa, kepala unit usaha bumdesa dan masyarakat desa.

Informan dalam penelitian ini adalah aparat desa dan pengurus BUMDesa Tunas Harapan serta masyarakat yang berjumlah sebanyak 6 orang yang terdiri dari:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Direktur BUMDesa
4. Kepala Unit Usaha
5. Masyarakat (2 orang)

Untuk menentukan dan mendapatkan informasi selanjutnya peneliti menggunakan metode *snowball sampling*. Metode *snowball sampling* adalah penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena menurut peneliti belum lengkap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu atau dapat melengkapi data yang diberikan oleh diberikan oleh dua sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak **Sugiono (2003:97)**.

d. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber berupa informasi dan hasil proses wawancara dan informasi penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian serta didukung dengan data observasi yang dilakukan penulis seperti:

1. Hasil wawancara langsung dengan informan.

2. Data dari fakta yan ada dilapangan yang diperlukan secara hasil wawancara kegiatan badan usaha milik desa (bumdesa) dalam meningkatkan perekonomian Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder penulis peroleh dari telaah pustaka serta pihak yang berkaitan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan guna melengkapi data yang ada. Data tersebut berupa foto atau potret lokasi penelitian.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik:

1. Observasi

Yakni penulis mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan dan pencatatan atau pemotretan secara cermat dan sistematis.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan bahasa yang dipakai masyarakat dalam kehidupan sehari – hari, hal ini penulis melalui wawancara ini yaitu informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan melakukan pencatatan.

f. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalm penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu penganalisaan dengan cara mengumpulkan data yang ada diperoleh dilapangan dan kemudian data tersebut dianalisa dan ditelaah dalam tanpa menggunakan perhitungan-perhitungan angka melainkan dianalisa dengan cara pemikiran yang logis berdasarkan teori – teori, data lapangan, pendapat serta pernyataan – pernyataan yang mendukung penganalisaan penelitian ini. Pada

penelitian ini teknik pengukuran yang digunakan yaitu teknik triangulasi, yaitu pengecekan atau membandingkan informasi suatu informasi dengan dengan informasi lainnya dengan sumber yang berbeda dan ditarik kesimpulannya.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar pada BAB III sebelumnya, maka pada BAB IV ini penulis akan memberikan kesimpulan mengenai masalah penelitian tersebut beserta saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang telah penulis kemukakan.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tanjung kecamatan koto Kampar hulu kabupaten Kampar belum sepenuhnya efektif karena dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan. Sehingga tujuan yang ingin dicapai belum tercapai yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Hal ini di landasi oleh faktor seperti tidak adanya perencanaan dari BUMDesa, pelaksanaannya hanya mengacu pada tujuannya saja. Hal ini yang menyebabkan pendirian BUMDesa kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Faktor -faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tanjung kecamatan koto Kampar hulu kabupaten Kampar adalah partisipasi masyarakat yang masih kurang, Sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengelola BUMDesa sesuai dengan fungsinya. Faktor berikutnya adalah Koordinasi antara pengurus

BUMDesa dengan pihak desa, jika koordinasi dilakukan dengan maksimal maka segala kendala dapat dihadapi dengan baik serta diperoleh solusi yang paling baik dari permasalahan yang sedang dihadapi.

B. Saran

1. Pengurus BUMDesa lebih gencar dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program yang dilaksanakan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan RT yang nantinya akan memberikan penjelasan langsung kepada warganya sehingga masyarakat dapat mengerti akan kewajiban mereka dalam BUMDesa tersebut.
2. Perlu pengadaan pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDesa untuk menambah kemampuan, skill dan wawasan yang memadai dalam menjalankan usaha yang direncanakan. Koordinasi antara pihak Desa dengan pengurus BUMDesa agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi BUMDesa dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. 1988. *Permasalahan Pelaksanaan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Badrudin. 2014. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Dr. Sunyoto Usman. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit: Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Handoko, T, Hani. 2003. *Manajemen dasar, pengertian dan masalah*. Gunung Agung:jakarta
- Mardikanto, T. dan poeworko soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung:Bandung
- Ndraha, Thaziduhu. 2003. *Kronologi : Ilmu Pemerintahan Baru*. Direksi cipta: Jakarta

Prijono, Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi* CSIS:Jakarta

Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. bumi Aksara.

Syahza, Almahti, 2009. *Ekonomi Pembangunan*.cv.witra Irzani: Pekanbaru

Suparmoko, M, 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Andi: yogyakarta

Sujianto, 2009. *Pemberdayaan Menuju Masyarakat Mandiri. Studi Kajian di Kabupaten Pelalawan*. Alaf Riau: Pekanbaru

Sumaryadi, I,N, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama:Jakarta

Sumodinigrat, Gunawan, 2007. *Pemberdayaan Sosial Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Kompas : Jakarta.

Sutrisno, edi. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: bandung

Terry,G.R. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. PT.Renika Cipta: Jakarta

Dokumentasi

Undang - undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Desa Nomor 02 Tahun 2016 tentang BUMDesa